

Titik Balik di 2011

Tantangan terbesar menurunkan tingkat suku bunga ada di inflasi. Dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, Indonesia memang akan sulit menciptakan inflasi rendah.

Asep Toha

MENJALANKAN peran kebank-sentralan bak melakoni peran gelandang dalam sebuah ke-sebelasan sepak bola. Seorang gelandang bukan saja mahir menyokong penyerang, tapi juga jadi garda terdepan pertahanan sebelum bola memasuki wilayah pemain belakang.

Inilah lakon yang harus dijalani Bank Indonesia (BI) dan sosok Darmin Nasution sebagai gubernur terpilih. Selain membantu pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, juga jadi penyeimbang dalam menjaga eksekutif pertumbuhan ekonomi, yakni inflasi.

Karena itu, sebagai pejabat gubernur terpilih, Darmin punya sejumlah target yang

harus dicapai BI. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatra Utara, 21 Desember 1948 ini pun, mematok 2011 sebagai titik balik BI.

Langkah menuju titik balik tersebut, utamanya diprioritaskan pada perbaikan kualitas pengawasan bank di awal. Pasalnya, titik ini menjadi lubang dan sorotan banyak pihak terkait fungsi dan peran BI.

Kemudian, pengendalian inflasi, peningkatan intermediasi bank dalam perannya menyokong pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan iklim perbankan yang efisien, dengan suku bunga kredit rendah, sebagai target-target berikutnya.

Untuk target pertama, terkait kualitas pengawasan bank, Darmin mengaku sebagian kebijakan telah dijalankan termasuk pengaturannya. Dengan demikian pengawasan BI akan jauh berbeda dengan

di masa lalu.

Menurutnya, masalah pengawasan disebabkan persoalan sistem yakni sejak dari Undang-Undang (UU) No 10/1998 tentang Perbankan, hingga aturan teknisnya.

Dia mengambil satu contoh sumber persoalan di aturan tersebut. Yakni pada kata 'dapat' di pasal penanganan bank bermasalah.

Konsekuensi dari kata ini, tegas Darmin, pengawas harus menanggung risiko secara pribadi ketika penanganan tidak sesuai rencana. "Di UU, itu cukup lumrah. Di pajak itu juga banyak. Kuncinya di aturan turunannya, (seharusnya) tidak boleh lagi ada kata 'dapat'."

Kemudian, BI juga kini mempertegas batas waktu bank berada dalam status pengawasan intensif. Saat ini tidak ada batasan waktu. Karena itu, status bisa bertahan seumur

hidup, asal bank memiliki rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) di atas 8%. "Jadi yang terjadi di sejumlah bank, itu mereka tidak masuk ke pengawasan khusus, tapi terus-terusan di pengawasan



Di struktur pasar ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dalam proses distribusi barang. Artinya, di berbagai produk, selalu ada pemain dominan yang memungkinkan memengaruhi pembentukan harga."

intensif," jelas Darmin.

Ke depan, ada batasan waktu, sampai kapan sebuah bank bisa berada dalam pengawasan intensif. Langkah-langkah itu-lah, menurut Darmin, menjadi prioritas BI karena paling banyak memengaruhi pandangan orang.

Suku bunga

Kemudian terkait tingkat suku bunga, Darmin menjelaskan, "Tingkat bunga sekarang ini adalah tingkat bunga pasar paling murah jika dibandingkan dengan 30 sampai 40 tahun lalu."

Dia membandingkan, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 7%-8%, kreditynya berjalan, namun tingkat suku bunga kredit saat itu berada di 18%-20%.

Tetapi, ekonom lulusan Universitas Sorbonne Paris, Prancis, ini mengakui tingkat suku bunga saat ini, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, memang tetap kurang rendah.

"(Tetapi), inti persoalan suku bunga ini sebenarnya berawal dari inflasi. Sekarang ini, inflasi Indonesia rata-rata sebesar 5%-6%. Angka ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang sudah bertahun-tahun inflasinya berada di kisaran 2%-3%, atau Filipina di 3%-4%."

Karena itu, tantangan terbesar untuk menurunkan tingkat suku bunga ada di persoal-

an inflasi. Dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, Indonesia memang akan sulit menciptakan inflasi rendah. Kondisi ini diperparah minimnya infrastruktur dan moda transportasi.

"Bukan itu saja, di struktur pasar kita ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan di dalam proses distribusi barang-barang. Artinya, di berbagai produk itu, selalu ada pemain-pemain yang cukup dominan yang memungkinkan mereka memengaruhi pembentukan harga," tukasnya.

Karena itu, Darmin mengakui, efektivitas kebijakan moneter memengaruhi harga sedikit terbatas. Pasalnya, selain faktor *administered price* misalnya kenaikan biaya surut tanda nomor kendaraan (STNK), efektivitas kebijakan itu tereduksi oleh persoalan musim.

Dengan demikian, meskipun jika dilihat di inflasi inti (*core inflation*) posisinya di 4%, inflasi tahunan berada di level 6,2% (*year on year / yoy*).

Dengan demikian, dilema kebijakan moneter ialah menyeimbangkan tekanan inflasi

dengan kecukupan likuiditas. Kebijakan moneter terlalu ketat mungkin dampaknya ke inflasi bisa positif, tapi perbankan bisa kesulitan likuiditas untuk memberikan kredit. Jadi kebijakan BI itu mencari titik agar inflasi tidak tinggi, tapi kredit tetap lancar. "Itu gampang diucapkan tapi melaksanakannya sulit," ujarnya.

Dia lalu menguraikan, untuk masalah kredit, BI sedang menyiapkan aturan. "Kalian pernah dengar aturan LDR-GWM."

Dalam catatan *Media Indonesia*, terkait aturan giro wajib mi-

nimum (GWM) dan rasio kredit terhadap dana simpanan (*loan to deposit ratio*/LDR), BI memang tengah menyusun regulasi.

Rencananya, BI akan menetapkan besaran LDR pada level 75%-105% untuk menghitung GWM perbankan. Misalnya, jika LDR sebuah bank berada pada kisaran tersebut, nilai GWM tetap 5%. Namun, jika ada yang lebih atau kurang dari kisaran tersebut, akan mendapat penalti, misalnya GWM lebih dari 5%. "Kita percaya itu bisa mendorong penyaluran kredit."

Selain itu, BI juga tengah menyiapkan kebijakan untuk menekan suku bunga dengan mewajibkan bank mengumumkan *prime lending rate*-nya setiap bulan.

Dengan gambaran tadi, Darmin mengatakan, perbaikan sebenarnya sudah terjadi. Beberapa di antaranya telah dilaksanakan, sebagian menunggu aturan resmi. "Dengan begitu, sebenarnya akhir tahun ini semua sudah *in place*. Jadi pada 2011 awal, itu semua bisa mulai bekerja penuh dengan baik." (E-1)

asep@mediaindonesia.com



MIRAMDANI

DARMIN NASUTION

Tempat/Tgl Lahir : Tapanuli, 21 Desember 1948
Agama : Islam
Jabatan Terakhir : Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia/
 Pjs Gubernur Bank Indonesia
Status Perkawinan : Menikah, 2 Anak

Ikhtisar Jabatan :

Dosen FEUI, 1976-Sekarang
 Wakil Kabid Peneliti LPEM-UI, 1987-1989
 Kepala LPEM-UI, 1989-1993
 Asmenko I Indag, 1993-1995
 Asmenko I Prodis, 1995-1998
 Asmenko I Wanbangan, 1998-2000
 Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, 2000-2005
 Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, 2005-2006
 Direktur Jenderal Pajak, 2006-2009
 Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 2009-2010

Jabatan-Jabatan Lain :

Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Reasuransi Umum Indonesia, 1989-1995
 Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1995-2000
 Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo I, 1998-2002
 Presiden Komisaris PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium), 1998-2002
 Komisaris Utama PT (persero) Bank BTN, 2000-2001
 Komisaris Utama Bank Danamon Indonesia, 2002-2003
 Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Bank Mandiri, 2003-2005
 Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, 2005-2009

Tanda Penghargaan :

Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, 1996
 Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI, 1997
 Satyalencana Karya Satya XX dari Presiden RI, 1999
 Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, 2010



PT (PERSERO) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG & ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANGAN

Jl. Pulokambang No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13920
 Telp. 021 4600305 Fax 021 4600730
 e-mail : jep@jep.co.id, web : www.jep.co.id

NERACA KONSOLIDASIAN			KEMAJIBAN DAN EKUITAS					
Per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah)			2009			2008		
AKTIVA	2009	2008	2009	2008	2009	2008		
Kas dan setara kas	70.578.207	53.903.745	Kewajiban	2.231.852	4.652.806			
Penyisihan dana untuk penyelesaian kewajiban/komitmen Perusahaan	-	3.933.183	Hutang usaha	2.633.541	1.847.942			
Piutang usaha	-	-	Hutang lain-lain	5.513.709	2.829.923			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 9.274.837 pada tahun 2008 dan Rp. 8.606.951 pada tahun 2007)	20.889.509	6.108.998	Biaya masih harus dibayar	3.619.074	2.798.825			
Piutang lain-lain	-	-	Pendapatan yang ditangguhkan	8.735.880	5.983.056			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu masing-masing sebesar Rp. 69.675 pada tahun 2008 dan tahun 2007)	907.906	1.477.025	Jaminan sewa & utilitas	8.020.739	7.179.123			
Persediaan	18.425.516	16.303.279	Estimasi imbalan pasca kerja karyawan	1.056.106	952.802			
Pajak dibayar dimuka	295.859	295.859	Cadangan biaya pengurangan perkara tanah	300.000	300.000			
Biaya dibayar dimuka	166.114	163.456	Taksiran kewajiban pengembangan kawasan di masa mendatang	-	-			
Penyerahan pada anak perusahaan	-	-	Jumlah Kewajiban	32.110.900	26.544.477			
Aktiva tetap	-	-	Bagian minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(12.694)	(8.509)			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 23.749.017 pada tahun 2008 dan Rp. 22.044.969 pada tahun 2007)	49.124.459	51.020.899	Ekuitas	-	-			
Bangunan dalam penyelesaian	216.991	49.271	Modal Saham	-	-			
Aktiva pajak tangguhan	2.270.882	2.028.554	(Modal dasar sebesar Rp. 100.000.000 ribu terdiri dari 100.000 lembar saham, dg nilai nominal Rp. 1.000 ribu per lembar saham dan telah ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada tahun 2008 dan 2007)	80.000.000	50.000.000			
Aktiva lain-lain	-	-	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	3.122	3.122			
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 9.882.969 pada tahun 2008 dan Rp. 7.317.007 pada tahun 2007)	10.551.266	8.936.196	Saldo laba	-	-			
Jumlah aktiva	173.426.709	144.220.465	Ditentukan penggunaannya	40.621.303	62.122.388			
			Tidak ditentukan penggunaannya	20.754.078	5.558.988			
			Jumlah ekuitas	141.328.503	117.684.496			
			Jumlah kewajiban dan ekuitas	173.426.709	144.220.465			

Catatan : Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Juaend, Chairul Labib, Subyakti & Rekan dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualian, sesuai laporan auditor No. 16/LCLSL-LAI/2010.

KOMISARIS DAN DIREKSI

Komisaris :
 Komisaris Utama : Gebyar H. Triono
 Komisaris : Agus Suharyono
 Komisaris : Ide Zakaria
Direksi :
 Direktur Utama : Agus Dwitarto
 Direktur Keuangan : Machfud Arief Effendi
 Direktur Operasional : Dicky Digoyo

Jakarta, 16 Agustus 2010

Direksi

Ttd
 Machfud Arief Effendi

Ttd
 Agus Dwitarto

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah)		
	2009	2008
Pendapatan Utama	-	-
Pendapatan kawasan	-	-
Penjualan tanah kawasan	24.914.448	1.182.489
Pendapatan pengelolaan kawasan	13.456.523	14.325.762
	38.370.971	15.508.251
Pendapatan penyewaan	22.349.885	23.578.808
Pendapatan sewa	1.326.901	2.531.504
Pendapatan penyelesaian lainnya	23.676.786	26.110.312
Pendapatan real estate	2.386.200	-
Penjualan real estate	229.241	158.242
Pendapatan pengelolaan real estate	2.615.441	158.242
	1.259.152	-
	65.922.349	41.776.804
Beban langsung	-	-
Beban kawasan	489.259	66.433
Harga pokok penjualan tanah kawasan	8.384.458	6.414.062
Beban operasional pengelolaan kawasan	9.995.179	5.765.017
Beban operasional penyewaan	373.614	-
Beban real estate	853.969	745.065
Harga pokok penjualan real estate	1.227.583	745.065
Beban operasional pengelolaan real estate	1.203.524	-
Beban langsung proyek	21.300.004	12.990.576
Jumlah beban langsung	44.622.346	28.786.228
Labas kotor	18.184.927	16.487.869
Beban tidak langsung	26.437.418	12.296.359
Beban penjualan umum & administrasi	6.922.221	3.680.487
Labas Usaha	33.359.640	15.978.846
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	-	-
Labas sebelum pajak	(5.359.781)	(3.550.703)
Beban/(penghasilan) pajak	(935.023)	(1.185.262)
Pajak kini	242.328	(334.924)
Pajak final	(6.052.476)	(5.070.889)
Pajak tidak final	-	-
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah beban/(penghasilan) pajak	27.307.164	10.907.957
Labas bersih sebelum bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan	4.184	14.490
Bagian minoritas atas (laba)/rugi bersih anak perusahaan	27.311.348	10.922.448
Labas bersih	-	-

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) CABANG CIREBON

PENGUMUMAN PELELANGAN

Nomor : 84 / Pan.pel / VIII / 2010

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Rekanan Penyedia Barang/Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon bermaksud mengadakan Pelelangan Pekerjaan :
- "PENGADAAN 1 (SATU) UNIT WHEEL LOADER KAPASITAS 5 TON PELABUHAN CABANG CIREBON"
- Pagu Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-
- Sumber Anggaran : Anggaran Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon.
- Waktu & Tempat Pendaftaran :
 Hari : Senin s/d Jum'at.
 Tanggal : 16 s/d 20 Agustus 2010.
 Waktu : Jam 09.00 s/d. 16.00 WIB (Istirahat jam 12.00 s/d. 13.00 WIB) kecuali Jum'at istirahat jam 11.30 s/d. 13.30 WIB).
 Tempat : Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon, Jln. Pertierra No. 4, Cirebon.
- Syarat - syarat Pendaftaran
 Kepada perusahaan yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy dokumen, sebagai berikut :
 a. Membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan apabila mewakili, surat kuasa ditandatangani pimpinan perusahaan diatas materai bertanggal dan diberi stempel cap perusahaan serta dilampiri dengan fotocopy KTP pemberi kuasa (pimpinan perusahaan) dan penerima kuasa.
 b. Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Bidang Perdagangan Alat Berat dengan kualifikasi golongan usaha Menengah (M) atau Besar (B).
 c. Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan Departemen Hukum dan HAM.
 d. Mempunyai pengalaman kerja pada pekerjaan Pengadaan Alat Berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) kali dengan kontrak pekerjaan minimal senilai Rp. 1,25 milyar rupiah lengkap dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 e. Mempunyai Bukti Setoran Pajak Tahun 2009 dan 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli) Tahun 2010.
- Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada website www.inaport2.co.id atau papan pengumuman pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon Jalan Pertierra No. 4, Cirebon.

Cirebon, 16 Agustus 2010

Ttd

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN SELEKSI REKANAN PENYEDIA BARANG/JASA PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG CIREBON